

FORUM

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro - Semarang

Menu Edisi Ini :

Pengantar	i
Ahmad Taufiq Peran Lembaga Non Pemerintah Dalam Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Pasca Gempa Bumi Di Kabupaten Bantul	1
Rina Martini Peran Birokrasi Dalam Penanggulangan Bencana Alam	5
Turtiantoro Banjir, Kekeringan : Bencana Alam Tunggal Berdampak Jamak	11
Zainal Hidayat Letusan Gunung Merapi Dan Kearifan Lokal	16
Nunik Retno H Banjir : Penyebab Dan Pengendaliannya	20
Dyah Pitaloka Membangun Kembali (<i>Rebuild</i>) Masyarakat Dan Daerah Pasca Bencana Melalui Corporate Social Responsibility	24
Nur Hidayat Sardini Bencana Alam Tektonik : Mengenali, Mengakrabi, Dan Mengantisipasi	28
Suwanto Adhi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Indonesia	33
Priyatno Harsasto Moral Economic Apporach Of Amartya Sen	38
Agus Hermani DS Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan	42
Tri Cahyo Utomo TKI Di Malaysia Dan "Hak Atas Pendidikan" Para Anak Mereka	49

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro - Terbit Pertama kali bulan Februari 1972 ; **Penanggung Jawab :** Drs. Warsito, SU - Dra. Sri Widowati H, MS - Drs. Agus Hermani, MM - Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin ; **Ketua Penyunting :** Drs. Suwanto Adhi, SU ; **Sekretaris Penyunting :** Agus Naryoso, S.Sos ; **Penyunting Pelaksana :** Dra. Hartuti. P, MPA - Drs. Tri Cahyo Utomo, MA - Dr. Turnomo Rahardjo - Dra. Rodhiyah, SU ; **Penyunting Ahli :** Prof. Dr. Y. Warella, MPA (Undip) - Prof. Dr. Sudharto PH, MES (Undip) - Dr. Ari Pradhanawati, MS (Undip) - Prof. Dr. Roger Paget (USA) - Dr. Peter Suwarno (USA) - Dr. Dedy Nur Hidayat (UI) ; **Tata Usaha :** Drs. Moch. Jaiz - Staf Tata Usaha FISIP - Undip ;

Alamat :

MPIIS Forum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,
Jl. Imam Bardjo SH No. 1 Semarang Telp. (024) 8442532, 8414513
Fax. (024) 8449629 mad : mpiis-forum@usa.net

Sumbangan Tulisan :

Redaksi menerima sumbangan tulisan/foto yang relevan dengan tema atau topik pada setiap penerbitan. Setiap foto haruslah disertai dengan foto copy identitas yang jelas. Setiap artikel yang dikirimkan menjadi hak sepenuhnya dari redaksi untuk mengedit dan menampilkannya.

TKI DI MALAYSIA DAN “HAK ATAS PENDIDIKAN” PARA ANAK MEREKA

Oleh : Tri Cahyo Utomo *)

Abstract :

It is estimated that fifty percents (900.000) of Indonesian migrant-workers entering Malaysia in illegal ways. Consequently, the 35.000 children of the illegal workers are not allowed attending elementary schools due to the regulation enforced by Malaysian government. Therefore, Indonesian government itself or in cooperation with Malaysian government need to assure the implementation of the rights to education for the children of the illegal workers.

Keywords: *Illegal Indonesian migrant workers -Malaysia -children's rights to education.*

PENDAHULUAN

Salah satu dari beberapa persoalan pokok yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam hubungan antara Indonesia - Malaysia, terutama dalam dua dekade terakhir ini, adalah persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengandalkan kehidupannya di negara yang kini dipimpin oleh Abdullah Ahmad Badawi tersebut. Andaikata diperinci lebih lanjut, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan TKI di Malaysia, antara lain, dapat menyangkut: razia, penangkapan secara paksa, penipuan, pemerasan, penyiksaan dalam kamp tahanan, pengusiran secara paksa, pemalsuan dokumen, ancaman hukuman mati (“Hak Asasi Buruh Migran Indonesia”, <http://www.tempointinteractive.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs.20040617-07.id.html>).

Tulisan ini tidak akan banyak membahas masalah-masalah TKI seperti disebutkan di atas; akan tetapi akan membahas salah satu persoalan lain yang tidak kalah seriusnya dan kini tengah dihadapi terutama oleh para tenaga kerja kita disana, yaitu perwujudan “hak atas pendidikan” bagi anak-anak mereka yang berada pada usia sekolah. Dewasa ini, diperkirakan ada sekitar 35.000 anak TKI di Malaysia yang menghadapi kesulitan dalam mewujudkan hak atas pendidikan mereka. Akan tetapi sebelum membicarakan persoalan kesulitan dalam perwujudan hak atas pendidikan tadi dan saran-saran bagi penyelesaiannya, tulisan ini akan membahas terlebih dahulu aspek historis keberadaan TKI di Malaysia, reaksi pemerintah Malaysia menghadapi melimpahnya TKI serta para anak TKI ilegal. Pembahasan ketiga hal ini perlu dilakukan dengan maksud bisa memberikan informasi yang lebih utuh/lengkap mengenai

keberadaan mereka dan ketentuan –ketentuan umum, walau hanya sedikit, yang berlaku di negara dimana mereka berada.

ASPEK HISTORIS TKI DI MALAYSIA

Apabila ditinjau dari aspek geografis, Malaysia bisa dibagi dalam dua wilayah, yaitu Malaysia Timur yang terdiri dari negara bagian Sabah dan Serawak, serta Malaysia Barat/ Semenanjung, yang terdiri dari 12 negara bagian yang semi otonom. Kedua wilayah tadi dipisahkan oleh Laut Cina Selatan dengan jarak sekitar 800mil.

Kedatangan para pekerja Indonesia di negara tetangga itu sudah lama berlangsung walau pada mulanya tidak secara massal. Pada akhir abad 19 atau awal abad 20, pada waktu Malaya masih dijajah Inggris, perusahaan-perusahaan dengan ciri ekonomi kapitalistik diijinkan beroperasi disana (Asia Pacific Migration Research Network, “Migration Issues in the Asia Pacific, Issues Paper from Malaysia”, <http://www.unesco.org/most/apmrnwpg.htm>). Pada saat bersamaan, dibangunlah berbagai sarana komunikasi/ transportasi, seperti rel kereta api, jalan raya, maupun gedung-gedung. Perusahaan-perusahaan tadi kebanyakan bergerak di bidang usaha kopi, karet, kelapa serta timah. Dengan dibukanya perusahaan-perusahaan baru dan dibangunnya sarana/prasarana tadi, dibuka pulalah lapangan kerja baru. Jumlah yang dibutuhkanpun sangat banyak. Mengingat tenaga kerja lokal jumlahnya terbatas dan kurang tertarik bekerja di bidang-bidang tadi, maka didatangkanlah pekerja asing. Tenaga kerja dari Cina, India dan Srilanka banyak

ARTIKEL

yang berdatangan; sedangkan dari Indonesia, tidak begitu banyak yang datang. Dari sinilah, awal munculnya tenaga kerja kita (TKI) disana.

Pada waktu itu pun, pemerintah kolonial Inggris sudah mulai memberlakukan politik "divide and rule". Di wilayah Semenanjung, orang-orang Melayu dan Indonesia dipekerjakan di wilayah pedesaan untuk bertani dan berladang. Orang-orang Punjab dan Sikh dari India dipekerjakan sebagai tenaga upahan di sekitar perkebunan dan konstruksi jalan, bangunan, polisi serta petugas kereta api. Orang-orang Cina dipekerjakan di sektor tambang timah dan berdagang di daerah perkotaan. Orang-orang Tamil dari Srilanka dipekerjakan sebagai penyadap karet (Achmad Marzuy, "TKI di Malaysia: Diperlukan dan Dipulangkan", http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2005/07/050720_indonworkers.shtml) Pola-pola kerja seperti ini nampak masih terasa warisannya sampai kini.

Semenjak tahun 1957, yakni tahun kemerdekaannya, Malaya berupaya mengubah orientasinya, dari negara yang bertumpu pada sektor agraris menjadi sektor industri. Serangkaian program pembangunan berjangka lima tahunan pun dilakukan mulai pertengahan dekade 1960an. Mulai awal dekade 1970an, Malaysia meluncurkan program "the New Economic Policy" (NEP) yang intinya meletakkan dasar-dasar industrialisasi secara serius. Kira-kira hanya dalam dua dekade, program itu menunjukkan hasilnya. Ekonomi Malaysia berkembang secara berarti dan tidak lagi mengandalkan karet dan timah. Sektor manufaktur mulai berperan penting. Lapangan pekerjaan tumbuh 3,22% per tahun, sedangkan pertumbuhan tenaga kerja yang tersedia hanya 2,9% saja per tahun. Situasi ketenagakerjaan seperti inipun diperparah dengan sikap pekerja domestik yang pilih-pilih. Pendidikan yang maju, standard hidup yang meningkat dan mobilitas yang tinggi merupakan faktor-faktor penyebabnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi, juga menyebabkan orang-orang Malaysia pindah kerja di daerah perkotaan. Dengan demikian, wilayah pedesaan mengalami kekurangan tenaga kerja. Untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di pedesaan ini, didatangkanlah, antara lain, pekerja Indonesia dalam jumlah banyak. Makin lama, jumlah pekerja Indonesiapun semakin banyak. Pekerjaan

para TKI disana biasanya berkaitan dengan 4D, yaitu: Dirty (kotor), Difficult (sukar), Dangerous (bahaya) dan Demeaning (merendahkan).

Ada beberapa alasan mengapa banyak orang Indonesia tertarik bekerja disana: 1) kemiskinan yang dialami para calon TKI; 2) upah kerja yang relatif tinggi di Malaysia. Dengan bekerja disana, mereka berharap bisa memperoleh uang cukup dan mengatasi kemiskinannya; 3) banyak beroperasinya calo tenaga kerja (Tamrin Amal Tomagola, "Cambuk Apartheid Melayu", *KOMPAS*, 28 Februari 2005).. Dengan mendatangi daerah-daerah pedesaan di Indonesia, mereka menawarkan pekerjaan dengan upah yang cukup tinggi. Situasi ini mendorong minat mereka bekerja di Malaysia. Kerja para calo ini merupakan bisnis tersendiri yang cukup menggiurkan.

Pada mulanya, para TKI mendapat simpati dari sebagian besar penduduk lokal. Mereka rajin, mau kerja lembur, bersedia menerima upah rendah dan bisa hidup sederhana. Oleh karena itu, pemerintah Malaysiapun tidak jarang memberi mereka surat ijin tinggal tetap. Namun demikian, dalam perkembangannya dan seiring dengan semakin banyaknya pekerja Indonesia yang datang, muncul penilaian negatif dari orang-orang Malaysia terhadap para TKI. Ada beberapa alasan penyebabnya: 1) TKI pendorong munculnya problema sosial. Tidak semua TKI bekerja di sektor pertanian, perkebunan, ataupun konstruksi. Menurut Laporan Asia Pacific Migration Network, ada diantara mereka yang bekerja sebagai pengemis ataupun pelacur. Survey yang dilakukan pemerintah tahun 1995 menunjukkan bahwa 80% dari pengemis di negeri itu berasal dari negara-negara lain, termasuk Indonesia. Diantara para pekerja asing, termasuk di dalamnya orang Indonesia, yang dituduh melakukan praktek ajaran agama Islam secara menyimpang. Mereka mempraktekkan ajaran sekte Naqshabandiah. Bahkan dilaporkan ada sekitar 120 wanita Indonesia yang bersuami dua orang: satu di Indonesia dan satu di Malaysia. Ini dimaksudkan untuk melindungi mereka selama bekerja disana. Ada TKI yang beragama Islam bekerja di keluarga-keluarga non Islam. Jenis pekerjaan ini dianggap merendahkan orang-orang Islam Malaysia. Lebih daripada itu, bekerjanya para TKI di sektor konstruksi di wilayah perkotaan, ikut menyebabkan kesulitan baru bagi orang-orang Malaysia golongan bawah.

Mereka menganggap naiknya harga sewa rumah bagi golongan rendah di daerah perkotaan disebabkan berdatangnya TKI di negara itu. 2) TKI penyebab munculnya penyakit. Kedatangan TKI di Malaysia dianggap sebagai biang penyebab munculnya beberapa penyakit, seperti: malaria, TBC, hepatitis A dan B, syphilis, tetanus. Penyakit-penyakit ini mereka anggap sudah hilang; namun dengan kedatangan TKI, penyakit itu pun muncul kembali. Yang menjadi korban, tidak hanya sesama TKI tetapi juga orang-orang Malaysia yang sering bergaul dengan mereka. 3) TKI penyebab munculnya persoalan politik. Kehadiran TKI dalam jumlah yang banyak menyebabkan munculnya protes dari partai-partai politik, yang berafiliasi dengan etnis Cina dan India. The Democratic Action Party, misalnya, menilai kedatangan TKI akan memperkokoh posisi politik UMNO. Orang-orang Indonesia dengan Melayu adalah serumpun dan mereka dinilai akan saling membantu, termasuk dalam persoalan politik. Partai UMNO bersikap moderat terhadap para TKI, sedangkan para TKI mendukung posisi UMNO (Wahyu Susilo, "Soal Warga Indonesia Tanpa Paspor di Malaysia", *KOMPAS*, 12 Januari 2006).

REAKSI PEMERINTAH MALAYSIA

Semakin banyak jumlah TKI dan semakin banyak persoalan yang ditimbulkannya, maka semakin besar penilaian negatif orang-orang Malaysia terhadap mereka. Dalam suasana seperti ini, maka semakin besar tekanan rakyat Malaysia terhadap pemerintah Malaysia untuk menertibkannya. Upaya penertiban kedatangan TKI ini dimulai dengan dibentuknya Jawatankuasa Pengambilan Pekerja Asing pada bulan Juli 1982. Kemudian, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Persetujuan Medan 1984 yang mengatur kedatangan TKI dan agen-agen perekrutnya. Lima tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, pemerintah Malaysia mengadakan Program Pemutihan Pendatang Tanpa Izin (semacam amnesti). Hal ini perlu dilakukan mengingat semakin banyaknya jumlah TKI yang masuk ke negara itu secara tidak sah (ilegal). Mengingat sensitifnya hubungan dengan Indonesia berkaitan dengan semakin meningkatnya persoalan TKI, pemerintah Malaysia berupaya bertindak moderat. Pemerintah negara setempat memutuskan memperpanjang

kebijakan amnesti, dan tidak segera bertindak keras terhadap para TKI. Program amnesti ini sempat ditunda beberapa kali penghentiannya dan diperpanjang terus masa berlakunya. Terakhir, masa berlakunya sampai 31 Januari 2005 (Wahyu Susilo, "Opsi Atasi Krisis Buruh Migran Tak Berdokumen di Malaysia: Pemutihan Paspor dan Kontrak Kerja", *KOMPAS*, 12 Februari 2005). Program ini dicanangkan untuk membantu mereka yang sudah bekerja di negara itu tetapi ijinnya dianggap tidak sah. Setelah tanggal itu, pemerintah Malaysia berjanji bertindak lebih tegas.

Namun, nampaknya program-program yang dicanangkan tadi kurang banyak membawa hasil. Untuk menertibkan para TKI, pemerintah Malaysia juga tidak segan-segan melancarkan razia, penangkapan, penahanan, pemejahijauan, pengenaan denda, hukuman dan bahkan pemulangan ke tanah air. Ratusan ribu TKI yang sudah dipulangkan dan dalam masa-masa mendatang, jumlah ini mungkin akan terus bertambah.

PARA ANAK TKI

Diperkirakan, sekitar 50% (900.000 orang) dari total TKI di Malaysia masuk dalam kategori ilegal (Bandingkan tulisan Agus Widarjono, "Perjanjian Bilateral Indonesia - Malaysia", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0202/15/khaz.htm>, dengan tulisan Wahyu Susilo, "Soal Buruh Migran Tak Berdokumen", *KOMPAS*, 4 Maret 2005). Mereka adalah para pekerja yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah Malaysia untuk bekerja disana. Mengapa jumlah TKI ilegal begitu banyak? Ada beberapa alasan: 1) biaya pengurusan resmi terlalu mahal. Untuk memenuhi prosedur pemberangkatan secara resmi, diperlukan biaya antara Rp.5 juta-Rp.10 juta. Disamping itu, pemerintah Malaysiapun mengadakan pungutan terhadap TKI yang meminta surat ijin kerja. Untuk buruh bangunan, setiap pekerja ditarik rata-rata RM.225 per bulan selama satu tahun (Abdul Chalid, "TKI Ilegal dan harga Diri Kita", *KOMPAS*, 28 Agustus 2002). Biaya ini tentu diluar kemampuan seorang calon TKI. Oleh karena itu, mereka mencari cara pemberangkatan dengan biaya yang murah, yakni secara ilegal. Biaya yang diperlukan antara Rp.2 juta-Rp.3 juta saja (Payaman J Simanjuntak,

ARTIKEL

“Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia, http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2_vi_2004/perlindungan.”). 2) cara pengurusan pemberangkatan yang resmi dianggap terlalu birokratis, berbelit-belit dan menghabiskan waktu banyak. Oleh karena itu, mereka berupaya mencari jalan pintas saja. 3) para majikan menginginkan tenaga kerja murah. Untuk terpenuhinya keinginan ini, tidak segan-segan para majikan di Malaysia memberikan bantuan kepada para calon TKI untuk masuk secara ilegal. 4) keterbatasan kemampuan. Tidak sebandingnya luasnya wilayah pantai maupun darat yang bisa digunakan masuk ke Malaysia dengan jumlah petugas penjaga perbatasan. Konsekwensinya, menurut laporan Asia Pacific Migration Research Network, para calon TKI tidak banyak mengalami kesulitan manakala mereka masuk ke Malaysia walaupun tanpa dokumen yang cukup memadai atau ilegal. 5) tidak mau pulang. Ada orang Indonesia yang masuk Malaysia dengan visa touris, walaupun disana mereka ternyata bekerja. Setelah masa berlaku visanya habis, mereka tidak mau berhenti bekerja lalu pulang ke Indonesia; akan tetapi mereka tetap tinggal disana. Mereka bersembunyi dan tentu saja status mereka menjadi ilegal.

Yang menjadi masalah adalah banyak diantara para TKI ilegal yang membawa keluarga mereka: istri dan anak-anaknya. Bagi para TKI, dengan membawa keluarga, mereka akan lebih tenang bekerja. Bagi majikan, TKI yang membawa keluarga akan menyebabkan mereka betah tinggal disana dan mereka pun nantinya bisa diajak sebagai tenaga kerja. Di Malaysia, di tanah dimana mereka bekerja, mereka pun masih beranak lagi. Inilah faktor pertama yang menyebabkan terdapatnya anak-anak TKI (ilegal) di Malaysia dalam jumlah besar. Bagi pemerintah Malaysia, tentu tindakan TKI yang membawa keluarganya ini, dan kemudian juga beranak-pinak disana, tidak bisa dibenarkan. Pemerintah Malaysia membuat peraturan yang tidak mengizinkan pekerja asing membawa keluarga, termasuk anak-anak mereka.

Disamping alasan itu, banyak pula diantara para TKI/TKI ilegal yang “menikah” disana. Konsekwensinya, banyak pula anak-anak yang dilahirkan disana (informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Yuli Setyanto, Direktur PT Andika Bilenta Bhakti, Semarang, beserta empat orang wanita mantan TKI yang bekerja di

Malaysia masing-masing lebih dari dua tahun. Wawancara diadakan 13 Juli 2006). Andaikan pernikahan itu dilakukan sesama TKI ilegal, tentu saja, anak-anak yang mereka lahirkan ilegal pula. Inilah faktor kedua yang menyebabkan munculnya anak-anak TKI ilegal dalam jumlah cukup besar disana. Anak-anak yang dilahirkan disana tidak memiliki dokumen dan akibatnya mereka tidak mempunyai status hukum. Mereka juga tidak dapat dianggap sebagai warga negara Malaysia juga.

Di Malaysia, dokumen resmi, seperti surat kelahiran dan kartu identitas, sangat diperlukan. Dengan demikian, anak-anak yang dibawa dari tanah air secara ilegal dan yang dilahirkan disana oleh orang tua yang kedatangannya juga ilegal, maka status mereka pun secara otomatis ilegal. Tanpa dokumen resmi, mereka mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan lembaga-lembaga yang ada disana; apalagi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi, seperti sekolah-sekolah negeri (“Meutia Hatta Memprihatinkan Nasib TKI Ilegal”, <http://www.liputan6.com/view/0.95369.1.0.1129087874.html>). Dalam suasana seperti ini, banyak anak TKI, terutama yang ilegal, yang diperkirakan berjumlah sekitar 35.000, sangat sulit memperoleh hak-haknya atas pendidikan. Pemerintah negara bagian Sabah membuat peraturan bahwa anak TKI legal bisa mengikuti pendidikan sampai SD. Namun demikian, biayanya dianggap terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan penghasilan seorang TKI (“Kacau, Pengaturan Barak TKI”, <http://www.indonesia-house.org/Humanitarian/TKI-barak091502.htm>). Sedangkan anak TKI ilegal tidak diperkenankan mengikuti pendidikan, walau hanya pada level SD (“Ratusan Anak TKI di Sabah Terlantar Sekolah”, <http://www.indonesia.com/bpost/9809/19/kakal/kakal2.htm>). Demi kemajuan bangsa Indonesia pada masa kini dan mendatang, keadaan seperti ini harus segera diakhiri.

PERWUJUDAN HAK ATAS PENDIDIKAN PARA ANAK TKI DI MALAYSIA

Pembukaan dan pasal 13 UUD 1945 mengamanatkan kepada para penyelenggara negara, antara lain, untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan menjamin bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan". Amanat ini mengandung makna, secara normatif, bahwa negara dan para penyelenggaranya berkewajiban menyediakan segala sesuatu yang relevan dan dibutuhkan bagi upaya "pencerdasan kehidupan bangsa", paling tidak, melalui pembentukan lembaga-lembaga pendidikan. Negara dan penyelenggaranya berkewajiban mencerdaskan dan mendidik siapa saja, kapan saja dan dimana saja sepanjang mereka adalah warga negara Indonesia, tidak terkecuali bagi para anak TKI di Malaysia tadi. Terlebih-lebih bagi mereka yang masih berada dalam taraf usia sekolah.

Akhir September 2005 yang lalu, DPR Indonesia meratifikasi tidak saja Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau KIHSP, akan tetapi juga Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau KIHESB ("Dua Kovenan HAM Diratifikasi", *KOMPAS*, 1 Oktober 2005). Ratifikasi tadi tentu tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh dukungan internasional agar Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota Human Rights Council bentukan Perserikatan Bangsa Bangsa. Terlebih dari itu, dengan ratifikasi ini dikandung makna pengakuan akan adanya kewajiban negara Indonesia untuk mewujudkan berbagai hak individu yang tercantum di dalamnya. Pasal 13 KIHESB menjamin adanya hak atas pendidikan. Karena individu memiliki hak atas pendidikan, maka kewajiban negaralah untuk mewujudkannya. Dengan demikian, hak atas pendidikan yang dimiliki para anak para TKI di Malaysia pun, wajib dipenuhi oleh negara. Negara wajib mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan pemenuhan hak atas pendidikan para anak TKI di Malaysia. Anggaran tersebut dapat diambilkan dari dana APBN yang 20% dari anggaran tersebut memang dicanangkan untuk kebutuhan pendidikan nasional.

Kerjasama dengan pemerintah federal Malaysia yang selama ini telah disepakati, seperti penyediaan sekolah-sekolah dan ijin pengiriman para guru dari Indonesia, perlu diteruskan ("Jumlah Tenaga Kesehatan dan Pendidikan Kita", <http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cg?newsid1074825385.90794>). Apabila jumlah anak TKI ilegal di Malaysia yang tidak bersekolah berjumlah 35.000, dan setiap sekolah menampung 300-500 anak, maka diperlukan sekitar 100 sekolah untuk mereka (Program Pendidikan Bagi Anak TKI segera Sirealisasi", <http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=13794>) Kerjasama ini diperoleh setelah pemimpin kedua negara mengadakan serangkaian perundingan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sebanyak dua kali: di Kuala Lumpur Februari 2005 dan di Bukittinggi Januari 2006. Sedangkan Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Mohammad Najib di Kuala Lumpur Maret 2006. Demikian pula kerjasama di bidang pendidikan dengan LSM internasional, seperti Humana Children Aid Society, maupun lembaga-lembaga swasta nasional, seperti Yayasan Mgr. Gabriel Simon, Yayasan Hidayatullah, perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan lebih lanjut. Dana yang lebih besar dapat dikucurkan pemerintah Indonesia kepada mereka untuk meningkatkan pendidikan, sepanjang dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Mereka selama ini telah nyata-nyata terlibat dalam penanganan pendidikan anak-anak TKI. Demikian pula halnya kerjasama dengan para perusahaan pengguna jasa TKI. Kerjasama, dalam bentuk penyediaan sarana transportasi untuk sekolah, dengan mereka dapat terus dikembangkan pemerintah Indonesia. Tidak semata-mata menyangkut jumlah sarana transportasi, seperti yang telah disepakati selama ini, akan tetapi juga keperluan pendidikan lainnya, seperti bangku, kursi, buku tulis, buku pelajaran.

Pemerintah Indonesia perlu bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah negara bagian, utamanya dengan Sabah dan Serawak maupun dengan pemerintah-pemerintah daerah dimana TKI dan anaknya banyak bermukim. Kerjasama ini diperlukan untuk menghilangkan/mengurangi perbedaan peraturan yang dibuat pemerintah federal dengan negara bagian/daerah yang

essensinya menghambat perwujudan hak atas pendidikan para anak TKI. Dengan pemerintah negara bagian/daerah setempat, pemerintah Indonesia bisa bekerjasama untuk membuat "peta" persoalan pendidikan mereka. Antara satu negara bagian/daerah dengan negara bagian/daerah lainnya, mungkin berbeda peta persoalan pendidikannya. Berdasarkan hasil pemetaan persoalan inilah, pemerintah Indonesia bisa memberikan solusi terbaik, sesuai dengan peta persoalan masing-masing, bagi pendidikan mereka. Rencana pemerintah untuk membuat modul pendidikan Kejar Paket A, B dan C ("Unjuk Rasa Warnai Peringatan Hardiknas", <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0605/02/sh06.html>) maupun pengiriman guru dari daerah terdekat (Kalimantan Barat dan Timur) bisa dimatangkan.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah pemerintah dan DPR perlu merevisi UU No.39/2004 tentang "Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri". Memang pada umumnya, pemerintah negara tujuan tidak membolehkan TKI membawa keluarganya. Namun, andaikata faktanya tidak demikian (seperti yang terjadi di Malaysia), maka pemerintah Indonesia perlu memikirkan "perlindungan" terhadap mereka. Masalah hak atas pendidikan bagi anak-anak TKI, misalnya, perlu dicantumkan dalam revisi undang-undang tadi. Konsekwensinya namanya akan berganti menjadi Undang-Undang "Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri dan Keluarga Mereka". Andaikata revisi ini terjadi, maka, amanat "mencerdaskan kehidupan bangsa" melalui pendirian lembaga-lembaga pendidikan, bisa dilaksanakan bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Lagipula, karena sama-sama belum menandatangani, Indonesia perlu mengajak Malaysia meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990. Karena kalau kedua negara tadi meratifikasi, maka Konvensi ini bisa segera berlaku efektif. Penting diketahui bahwa untuk bisa berlaku diperlukan ratifikasi 20 negara, dan sampai saat ini diperkirakan sudah 19 negara yang meratifikasi ("Hak Asasi Buruh Migran Indonesia", <http://www.temppointeractive.com/he/narasi/2004/06/17/nrs.20040617-07.id.html>). Konsekwensinya, pemerintah Malaysia pun berkewajiban "melindungi" para anak TKI dan tidak bisa memperlakukan mereka secara sembarangan. Termasuk didalamnya, di bidang pendidikan.

PENUTUP

Pengakuan secara konstitusional, penandatanganan konvensi internasional serta ketersediaan dana tidak menjamin terwujudnya "hak individu atas pendidikan" secara otomatis. Perwujudan hak atas pendidikan, diakui bukan pekerjaan mudah dan murah; apalagi bagi para anak TKI di luar negri (Malaysia) dan statusnya pun ilegal. Oleh karena keadaannya yang demikian, maka penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah negara lain (Malaysia). Lagipula, kerjasama tidak cukup dijalin dengan lembaga-lembaga swasta nasional, akan tetapi juga dengan lembaga-lembaga swasta internasional/negara lain. Hanya dengan cara seperti inilah, maka hak atas pendidikan bagi para anak TKI di Malaysia akan terwujud. Dengan cara seperti ini pula, maka salah satu persoalan yang cukup pelik yang membayangi hubungan Indonesia-Malaysia akan segera sirna. Hubungan baik kedua negara pada masa-masa mendatang akan semakin mudah dirajut.

DAFTAR PUSTAKA

Internet :

- Achmad Marzuy, "TKI di Malaysia: Diperlukan dan Dipulangkan", (http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2005/07/050720_indonworkers.htm).
- Agus Widarjono, "Perjanjian Bilateral Indonesia -Malaysia", (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0202/15/khaz.htm>).
- Asia Pacific Migration Research Network, "Migration Issues in the Asia Pacific, Issues Paper from Malaysia", (<http://www.unesco.org/most/apmrnwpg.htm>).
- "Hak Asasi Buruh Migran di Indonesia", (<http://www.tempointinteractive.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs.20040617-07.id.html>).
- "Jumlah Tenaga Kesehatan dan Pendidikan Kita", (<http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cg?newsid1074825385.90794>).
- "Kacau, Pengaturan Barak TKI", (<http://www.indonesia-house.org/Humanitarian/TKI-barak091502.htm>).
- "Meutia Hatta Memprihatinkan Nasib TKI Ilegal", (<http://www.liputan6.com/view/0.95369.1.0.1129087874.html>).
- Payaman J Simanjuntak, "Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia", (http://www.Nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2_vi_2004/perlindungan...).
- "Program Pendidikan Bagi Anak TKI Segra Direalisasi", (<http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=13794>).
- "Ratusan Anak TKI di Sabah Terlantar Sekolah", (<http://www.indonesia.com/bpost/9809/19/kakal/kakal2.htm>).
- "Unjuk Rasa Warnai Peringatan Harkitnas", (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0605/02/sh06/html>).
- Surat Kabar:
- Abdul Chalid, "TKI Ilegal dan Harga Diri Kita", KOMPAS, 28 Agustus 2002.
- "Dua Kovenan HAM Diratifikasi", KOMPAS, 1 Oktober 2005.
- Tamrin Amal Tomagola, "Cambuk Apartheid Melayu", KOMPAS, 28 Februari 2005.
- Wahyu Susilo, "Opsi Atasi Krisis Buruh Migran Tak Berdokumen di Malaysia: Pemutihan Paspor dan Kontrak Kerja", KOMPAS, 12 Februari 2005.
- Wahyu Susilo, "Soal Buruh Migran Tak Berdokumen", KOMPAS, 4 Maret 2005.
- Wahyu Susilo, "Soal Warga Indonesia Tanpa Paspor di Malaysia", KOMPAS, 12 Januari 2006.